

## PERSETERUAN DUA KUTUB PEMIKIRAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER: JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN MEDIA DAKWAH

*Akh Muzakki*

**M**enguatnya wacana Islam liberal oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) di tengah gerakan reformasi Indonesia memperoleh respon kontra dari Media Dakwah (MD), sebuah majalah bulanan yang dikelola oleh dan berafiliasi kepada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). MD, dalam sejarahnya, tercatat sebagai salah satu institusi yang pernah terlibat dalam pertentangan kuat dengan ide-ide mereka yang dikenal sebagai pemikir pembaru Islam, di antaranya Nurcholish Madjid (Cak Nur), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Munawir Sjadzali dan Ahmad Wahib. Dalam konteks pertentangan MD dan JIL, poin yang menarik adalah bahwa figur-figur pemikir pembaru Islam periode sebelumnya beserta berbagai gagasannya yang ditentang oleh MD ternyata menjadi inspirator (*inspiring figures*) bagi pemikiran Islam liberal JIL. Karena itu, tampak bahwa pertentangan antara MD dan JIL secara intelektual-historis menemukan presedennya dari perseteruan sebelumnya antara media tersebut dengan kelompok pemikir pembaru Islam.

Tulisan ini berupaya untuk menganalisis perseteruan antara MD dan JIL dalam konteks pemikiran Islam Indonesia kontemporer dalam kerangka perbandingan terhadap perseteruan serupa oleh MD dan pemikir pembaru Islam sebelumnya. Upaya ini dilakukan dengan menganalisis berbagai laporan atau tulisan yang diturunkan MD dan JIL dalam berbagai edisi terbitan masing-masing. Model analisis seperti ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Howard M. Federspiel terhadap majalah *Al-Muslimun*,<sup>1</sup> William R. Liddle<sup>2</sup> dan Ade Armando<sup>3</sup> terhadap

---

<sup>1</sup> Mengenai informasi detailnya lihat Howard M. Federspiel, "The Political and Social Language of Indonesian Muslims: The Case of *Al-Muslimun*," *Indonesia*, no. 38 (October 1984), 55-73.

<sup>2</sup> Lebih lanjut lihat William R. Liddle, "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia," in Mark R. Woodward (ed.), *Toward A New Paradigm: Recent Development in Indonesian Islamic Thought* (Tempe, Arizona: Arizona State University, 1996), 323-356. Tulisan Liddle ini sebelumnya pernah diterbitkan dalam bahasa

majalah *Media Dakwah* itu sendiri, serta Robert W. Hefner terhadap beberapa media seperti *Ummat*, *Media Dakwah*, *Republika*, *Tempo*, *Kompas*, dan *Ulumul Qur'an*.<sup>4</sup> Tulisan ini berargumentasi bahwa perseteruan antara JIL dan MD tidak sekadar replika atau repetisi dari perseteruan serupa sebelumnya antara kelompok pemikir pembaru Islam dan MD, tetapi juga pemajuan (*advancement*).

Mengingat realitas bahwa MD memberikan reaksi dan respon secara langsung dan spesifik terhadap JIL dan berbagai pemikirannya, sementara JIL merespon pemikiran MD secara sebaliknya, tidak langsung dan spesifik namun masih tetap dengan isu-isu besar, pembahasan tulisan ini dilakukan dengan menginvestigasi perseteruan yang terjadi di antara penyokong dan penentang liberalisme Islam tersebut dengan titik tekan pada kelompok yang disebut terakhir. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara mendiskusikan, pada tataran analisis tertentu, respon MD terhadap pemikiran-pemikiran Islam liberal JIL melalui berbagai [rubrikasi] mediana.

### **Membaca Perseteruan dari Respon MD terhadap JIL**

MD mulai secara aktif merespon fenomena JIL sejak Februari 2002, dan masih berlangsung secara berkesinambungan hingga tulisan ini dirampungkan. Secara khusus, MD mengawali responnya terhadap wacana Islam liberal yang diusung oleh JIL dan para kontributornya dengan menurunkan laporan khususnya tentang Islam liberal dan JIL serta misi dasarnya dalam edisi "Militer Bukan Berarti Teroris".<sup>5</sup> Laporan khusus tersebut disusuli oleh MD pada edisi berikutnya, "32 Tahun Gerakan Liberalisme Islam: Nurcholish vs Ibnu Taimiyah"<sup>6</sup>, dengan laporan

---

Indonesia di jurnal *Ulumul Qur'an*. Lihat Liddle, "Skripturalisme *Media Dakwah*: Satu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru," *Ulumul Qur'an*, no. 3, vol. IV (Tahun 1993), 53-65.

<sup>3</sup> Lihat Ade Armando, "Citra Kaum Pembaru Islam dalam Propaganda *Media Dakwah*," *Ulumul Qur'an*, no. 3, vol. IV (Tahun 1993), 66-76.

<sup>4</sup> Lihat Robert W. Hefner, "Print Islam: Mass Media and Ideological Rivalries among Indonesian Muslims," *Indonesia*, no. 64 (October 1997), 77-103.

<sup>5</sup> *Media Dakwah*, no. 332 (Februari 2002).

<sup>6</sup> *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002).

yang panjang mengenai Islam liberal di Indonesia dan aktivitas JIL, yang dikemas dalam laporan utama. Pada sejumlah edisi berikutnya, MD juga masih menurunkan laporan tentang Islam liberal dan JIL dalam beragam rubrik di antaranya “surat pembaca”, “wawasan”, “laporan daerah”, “nasional”, dan “Islamika”.

Dari berbagai laporan yang diturunkan untuk merespon Islam liberal dan JIL di atas, MD tampak menemukan “lawanandingnya” berupa institusi JIL untuk dijadikan sebagai titik sasaran kritisisme dan resistensinya terhadap segala bentuk pemikiran Islam liberal atau liberalisasi pemikiran Islam yang selama ini ada dan berkembang di Indonesia.<sup>7</sup> Institusionalisasi pemikiran Islam liberal di Indonesia ke dalam wadah JIL ini semakin mempermudah MD untuk melayangkan pemikiran kontranya terhadap Islam liberal, tanpa mengesampingkan perujukan terhadap pemikiran Islam liberal sebelumnya. Dengan demikian, jika pemikiran liberal dalam Islam Indonesia yang selama ini tidak terwadahi dalam institusi tertentu dengan atribut yang bisa menunjukkan identitas yang jelas dan konkret sebagai Islam liberal, maka penggunaan identitas JIL sebagai institusionalisasi pemikiran-pemikiran Islam liberal dimaksud memberikan jalan kemudahan bagi MD untuk menegaskan resistensinya secara terorganisir.

Secara mendasar, pemikiran JIL dinilai oleh MD sebagai serius dan mengkhawatirkan.<sup>8</sup> Penilaian demikian, bahkan, tampak mengakibatkan MD cenderung mengiringi argumentasi penolakannya terhadap substansi pemikiran yang digagas oleh JIL dengan penuh penanaman kesan buruk. Tidak jarang pula, bahkan, respon MD dimaksud hanya menunjuk kepada hal-hal yang periferal, daripada yang sentral, dari substansi pemikiran yang digagas oleh JIL. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa pemikiran yang substansial-sentral tidak muncul sama

---

<sup>7</sup> Dalam pandangan Khamami Zada, MD menganggap Islam liberal dan kelompok JIL sebagai lawan yang jelas untuk ditentang. Hal tersebut, menurutnya, terlihat jelas dari respon media tersebut terhadap berbagai pemikiran Islam liberal dan JIL yang didiseminasikan atau dipublikasikan di berbagai media, baik cetak, dengar maupun internet. Lihat Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), 97.

<sup>8</sup> Lihat di antaranya “Bahaya Islam Liberal (1),” *Media Dakwah*, no. 331 (Januari 2002), 33-8.; “Landasan Keropos Islam Liberal Membahayakan,” *Media Dakwah*, no. 332 (Februari 2002); Abduh Zulfidar Akaha, “JIL, Potensi No! Ancaman Yes! (Tanggapan atas Tulisan “JIL, Potensi atau Ancaman?”),” *Media Dakwah*, no. 340 (Oktober 2002), 28-30.

sekali dari respon MD terhadap JIL. Sebagai ganti dari penyapaan terhadap yang sentral dari substansi pemikiran JIL, MD tampak cenderung melakukan penggambaran atau pencitraan yang negatif terhadap JIL.

Meski penggambaran yang dikenakan oleh MD kepada JIL tidak jauh berbeda dengan pencitraan yang diberikan kepada sejumlah pemikir Muslim sebelumnya yang mengidealisasikan pembaruan pemikiran Islam Indonesia dan yang memiliki karakter berbeda dengan MD<sup>9</sup>, pemerian terhadap JIL memiliki tingkat stigmatisasi yang bisa menunjukkan adanya pertentangan yang tajam dan keras di antara keduanya. Akibatnya, kesan keras dan kasar yang selama ini dilekatkan kepada MD<sup>10</sup> menjadi semakin menemukan bentuk pembenarannya, dan hal itu semakin memperpanjang jalannya perseteruan antara kedua pihak.

Adapun pencitraan oleh MD terhadap JIL, paling tidak, dapat diklasifikasikan kepada beberapa nuktah berikut: JIL logika iblis, JIL bagian dari teror, bahaya dan ancaman terhadap Islam, JIL aliran sesat dan agen perusak akidah Islam, JIL penyebar fitnah dan kepanjangan tangan Orientalis dan sekularis Barat, serta JIL anti dialog dan pengecut. Dari sejumlah pencitraan ini, tidak ada satu pun yang memberikan gambaran dengan implikasinya yang positif terhadap JIL. Dengan berbagai pencitraan tersebut, pesan yang tampak ingin disampaikan oleh MD adalah bahwa JIL tidak mengusung nilai-nilai yang positif bagi Islam dan masyarakat Muslim Indonesia.

Terkait dengan nuktah pencitraan yang disebut pertama, melalui dua artikel yang diterbitkan secara bersamaan dalam satu edisi --"Islam Liberal: Menafsirkan Agama dengan Hermeneutika Barat-Islam" dan "JIL dan Logika Iblis"-- MD mengilustrasikan logika atau model pemikiran yang digunakan oleh JIL sebagai logika iblis.<sup>11</sup> Penggambaran ini terjadi di antaranya karena kerangka berpikir JIL

---

<sup>9</sup> Bandingkan dengan pencitraan MD terhadap Cak Nur, seperti dalam tulisan Armando, "Citra Kaum Pembaru Islam."

<sup>10</sup> Hefner, "Print Islam," 89-90; idem., *Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000), 112.

<sup>11</sup> Lebih lanjut lihat Syamsul Bahri Isma'iel, "Islam Liberal: Menafsirkan Agama dengan Hermeneutika Barat," *Media Dakwah*, no. 334 (April 2002), 25; Ceceng Rucita, "JIL dan Logika Iblis," *Media Dakwah*, no. 336 (Juni 2002), 16-8.

dipandang oleh MD dalam artikel yang disebut pertama sebagai logika *musytabihat*, sebuah logika yang dinilai hanya dimiliki oleh iblis. Logika seperti ini disebut juga sebagai *mudzabdzab*, dengan pengertian status yang tidak jelas, muslim tidak, kafir pun juga tidak (Isma'iel, 2002).<sup>12</sup> Meski secara diplomatis tidak ingin menyatakan kesamaan secara persis antara logika JIL dan iblis, MD melalui artikel yang disebut kedua tadi tetap menganggap tidak adanya perbedaan mendasar antara pola pemikiran JIL dan iblis (Rucita, 2002).

Identifikasi dan penegasan logika JIL serupa dengan logika iblis oleh MD di atas juga tampak terjadi akibat perbedaan mendasar dalam mendekati tekstualitas Islam. Islam liberal melihat teks al-Qur'an dan Hadits lebih dari sisi ide moral universal (*maqashid al-syar'ah*) yang dikembangkan daripada sisi bunyi harfiyahnya, sehingga jika konteks sosio-historis yang dihadapi oleh masyarakat tertentu tidak serupa dengan konteks saat diturunkannya teks tersebut, proses interpretasi ulang terhadap makna teks dengan beragam penghampiran yang menuntut maksimalisasi rasio sangat dimungkinkan untuk dilakukan.<sup>13</sup> Interpretasi ulang *nash* al-Qur'an dan Hadits oleh JIL dengan mengunggulkan rasionalitas dimaksud dianggap oleh MD melalui salah satu artikel "wawasan"nya, serta pengutipan pemikiran kontributor aktifnya, Hartono Ahmad Jaiz, dalam salah satu laporannya, sebagai penentangan dan penolakan terhadap *nash* itu sendiri, dan oleh karena itu dianggap pula serupa dengan logika iblis yang menggunakan *qiyas* saat menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepada Adam.<sup>14</sup>

Pencitraan MD terhadap JIL sebagai logika iblis di atas merupakan sesuatu yang baru, yang belum pernah diberikan oleh media tersebut kepada kelompok pemikir Islam Indonesia sebelumnya, termasuk pemikir pembaru seperti Cak Nur dan lain-lain. Terhadap kelompok pemikir pembaru Islam, MD, sebagaimana diteliti

<sup>12</sup> Isma'iel, "Islam Liberal: Menafsirkan Agama," 25; idem., "Statuta Hukum Nikah Lintas Agama: Belajar dari Kasus ke Kasus Serupa," *Media Dakwah*, no. 341 (Nopember 2002), 30.

<sup>13</sup> Lihat Ahmad Sahal, "Umar bin Khattab dan Islam Liberal," *Tempo*, no. 5/XXXI (7 April 2002), 49. Tulisan Sahal ini kemudian diterbitkan ulang sebagai bagian dari bab buku terbitan JIL tentang Islam liberal Indonesia. Lihat Luthfi Assyaukanie (ed.), *Wajah Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), 4-8.

<sup>14</sup> Lihat artikel "wawasan" oleh Rucita, "JIL dan Logika Iblis," 17; juga laporan berjudul "Tokoh JIL Disuruh Tobat," *Media Dakwah*, no. 342 (Desember 2002), 7.

oleh Ade Armando (1993), hanya memberikan cap negatif yang mengaitkannya dengan agenda politik Barat dan Yahudi, penghancuran Islam dari dalam, penyebaran kesesatan, serta anti dialog. Klaim sebagai logika iblis tidak tampak dilakukan dan diberikan oleh MD terhadap mereka meskipun tingkat kontranya media Islam tersebut terhadap mereka tidak kalah tingginya dengan hal yang sama yang dilakukan terhadap JIL. Dengan demikian, logika iblis termasuk frase yang menjadi kosa kata baru dalam kamus perbendaharaan pemikiran MD untuk dilekatkan kepada JIL.

Selain mencitrakan sebagai logika iblis seperti di atas, MD juga menggambarkan JIL sebagai bagian dari teror, bahaya dan ancaman terhadap Islam. Penggambaran ini dilakukan oleh MD terhadap kasus penggunaan label "Islam" sebagai bagian simbolik untuk menegaskan kehadiran dan identitas kelompok JIL dalam keterkaitannya dengan masyarakat Islam Indonesia. Kehadiran JIL di dalam kehidupan Islam Indonesia dianggap oleh MD lebih sebagai bagian dari teror, bahaya dan ancaman terhadap Islam, daripada sebaliknya, sebagai potensi bagi perkembangan Islam itu sendiri ke arah yang lebih baik.<sup>15</sup> Dalam salah satu artikel di rubrik "wawasan", MD menyebut bahwa alih-alih sebagai potensi yang bisa diharapkan bagi kebaikan Islam Indonesia, keberadaan JIL justru merupakan ancaman bagi umat Islam di tanah air karena JIL dianggap melakukan pembusukan Islam dari dalam. Klaim pembusukan ini dikenakan MD karena JIL masih menggunakan label "Islam" dalam berbagai gerakan liberalismenya meskipun kelompok ini, dalam pandangan MD, tidak hanya memberikan kemungkinan terhadap terjadinya pengaburan pemahaman Islam yang sebenarnya, tetapi juga membuat umat Islam ragu-ragu terhadap keyakinan keagamaannya yang dipegang selama ini (Akaha, 2002). Kehadiran JIL dengan berbagai gagasan liberalismenya

---

<sup>15</sup> Bahkan untuk kepentingan pencitraan ini, MD mendaftar sejumlah poin pemikiran para aktivis dan kontributor JIL serta mengomentarkannya. Lihat "Ucapan-Ucapan Destruktif Para Tokoh Liberal dan Pendukungnya," *Media Dakwah*, no. 332 (Februari 2002), 15-6; "Landasan Keropos Islam Liberal," 19-20; "Bahaya Islam Liberal (1)," 37-8; "Bahaya Islam Liberal (3): (Lanjutan Edisi Februari 2002M)," *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002), 33-8; "Kewajiban Menerapkan Syari'at Islam, Membincang Kontroversi Islam Liberal," *Media Dakwah*, no. 336 (Juni 2002), 34-9.

dalam Islam, dengan demikian, telah dipersepsikan oleh MD sebagai hal yang merugikan dan mengancam keberadaan Islam itu sendiri.

Klaim sebagai teror, bahaya dan ancaman terhadap Islam seperti di atas juga dikenakan oleh MD terhadap kasus misi dan tujuan kehadiran Islam liberal JIL di wilayah publik Islam Indonesia. Misi dan tujuan dihadapkannya JIL, seperti ditegaskan tokohnya, Luthfi Assyauckanie, sebagai bentuk "protes dan perlawanan" terhadap dominasi Islam ortodoks baik yang wajahnya fundamentalis maupun konservatif, dan sekaligus upaya untuk mencegah Islam militan dari penguasaan wilayah publik<sup>16</sup> dianggap oleh MD sebagai bagian dari gerakan pengacauan, teror dan permusuhan terhadap Islam Indonesia dalam wilayah opini publik. Alasan MD adalah bahwa apa yang dimisikan oleh Islam liberal JIL tersebut tidak mengandung kejelasan makna secara terminologis, dan sulit untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara akademis.<sup>17</sup>

Pandangan yang sama terhadap JIL sebagai teror, ancaman, dan pengelabuhan masyarakat dilakukan juga oleh MD dalam responnya terhadap kasus penggunaan slogan "Menuju Islam Yang Membebaskan" oleh JIL.<sup>18</sup> Slogan tersebut dianggap oleh MD sebagai sebuah bentuk teror, ancaman dan pengelabuhan terhadap masyarakat mengenai keberadaan kelompok liberal tersebut, yang tampaknya Islami di permukaan namun sebenarnya adalah sebaliknya.<sup>19</sup> Slogan yang dimaksudkan oleh JIL sebagai "Islam yang menekankan "kebebasan pribadi" sesuai dengan doktrin kaum Mu'tazilah tentang "kebebasan manusia" dan "pembebasan" struktur sosial-politik dari dominasi yang tidak sehat

---

<sup>16</sup> Dikutip dalam: "Penayangan Maya Islam Liberal," *Majalah PANTAU Online*, Tahun II Nomor 021 - Januari 2002: <http://www.pantau.or.id/txt/21/03.html> (Diakses 10 Desember 2002).

<sup>17</sup> "Islam Liberal dan Misinya," *Media Dakwah*, no. 332 (Februari 2002), 14.

<sup>18</sup> Penting untuk dicatat bahwa slogan "Menuju Islam Yang Membebaskan" tersebut merupakan slogan yang digunakan oleh JIL, seperti tampak pada *website*-nya, sejak pertama kali kelompok penyokong liberalisme Islam tersebut dideklarasikan. Namun, slogan JIL tersebut tampak berubah sejak minggu ketiga bulan Mei 2003; tidak lagi beredaksi seperti tersebut, melainkan berubah menjadi "Mencerahkan, Membebaskan". Lihat *website* JIL: [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com). Perubahan ini, meski belum ada penjelasan memadai dari JIL sendiri, tampak dilakukan, di antaranya, dalam hubungannya dengan respon dan reaksi dari kelompok lain serta pementapan dinamika internal kelompok Islam liberal dimaksud.

<sup>19</sup> "Musim Memilih Sekolah untuk Anak," *Media Dakwah*, no. 337 (Juli 2002), 16; Akaha, "JIL, Potensi No! Ancaman Yes!," 28.

dan menindas<sup>20</sup> tersebut dipahami oleh MD sebagai membebaskan diri JIL sendiri semauanya dengan tidak memberikan kebebasan kepada orang lain, serta membebaskan orang-orang Kristen untuk melakukan gerakan kristenisasi secara licik di Indonesia (Akaha, 2002). Pemahaman terhadap slogan JIL ini, seraya menarik isu kristenisasi ke dalamnya, menyebabkan MD lebih mempersepsi kehadiran JIL sebagai teror, bahaya dan ancaman bagi Islam di Indonesia daripada sebagai potensi kebaikan.

Pandangan MD terhadap JIL sebagai teror, bahaya dan ancaman terhadap Islam di atas bisa disebut merupakan peningkatan dari pencitraan sebelumnya yang dilakukan media tersebut terhadap pemikir pembaru Islam Indonesia terdahulu. Meski gagasan-gagasan keagamaan para pemikir pembaru Islam sama-sama memicu kontroversi yang besar seperti halnya JIL, klaim terutama sebagai teror terhadap Islam tidak tampak dikenakan oleh MD kepada mereka; hanya indikasi saja yang ditampakkan, dan tidak penyebutan verbal-vulgar. Seperti dicatat Ade Armando, beberapa bukti gagasan kontroversial para pemikir pembaru seperti Cak Nur digambarkan oleh MD sebatas sebagai membingungkan dan meresahkan umat, serta dianggap mendukung upaya penempatan kelompok Islam pada posisi yang perifer dalam kehidupan kebangsaan serta membuat kelompok Islam terdidik menjadi ragu terhadap keyakinan keagamaannya (Armando, 1993). Dengan demikian, penggambaran terhadap JIL sebagai teror terhadap Islam dapat disebut dengan istilah lain sebagai bentuk intensifikasi dari penggambaran sebelumnya terhadap para pemikir pembaru Islam terdahulu. Bentuk intensifikasi oleh MD ini bisa jadi dipicu oleh penggunaan label JIL sebagai identitas diri kelompok Islam liberal tersebut, sementara para pemikir pembaru Islam, seperti Cak Nur, tidak menggunakan label tertentu dalam gerakannya kecuali pembaruan semata.

Selain menyebut JIL sebagai logika iblis serta bagian dari teror, bahaya dan ancaman terhadap Islam seperti di atas, MD juga menggambarkan kelompok Islam liberal tersebut sebagai aliran sesat dan agen perusak akidah Islam. Dalam sejumlah

---

<sup>20</sup> Lihat Jaringan Islam Liberal (JIL). "Tentang Jaringan Islam Liberal," *Jaringan Islam Liberal Online*: <http://www.islamlib.com/REDAKSI/tentang.html> (Diakses 21 December 2002).



laporan MD, tampak penegasan bahwa JIL merupakan aliran sesat dan pemurtadan dimaksud.<sup>21</sup> Bahkan, JIL dan para kontributornya dianggap MD tidak lain kecuali “mengacak-acak Islam untuk kepentingan” sendiri dengan tingkat pengabdian kepada syetan dan berhala manusia yang sudah mencapai titik puncaknya.<sup>22</sup>

Adapun parameter pengenalan cap kesesatan dan perusakan akidah Islam terhadap JIL yang dilakukan oleh MD tersebut adalah bila pemikiran-pemikiran kelompok Islam liberal ini dinilai kontroversial dengan menunjukkan perbedaan secara mendasar dengan praktik Nabi atau dengan keyakinan keagamaan yang dipahaminya atau yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat Muslim. Salah satu contoh kasus pemikiran JIL yang dinilai kontroversial serta kemudian dicap sesat dan merusak akidah Islam adalah gagasan tentang waktu pelaksanaan ibadah haji oleh kontributornya, Masdar F. Mas'udi. Seperti diketahui, menurut pemikir ini, waktu yang menjadi keabsahan pelaksanaan ibadah haji tidak terbatas pada tanggal 9-13 Zulhijjah semata, tetapi membentang dalam tiga bulan: Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah.<sup>23</sup>

Merespon pemikiran kontributor JIL mengenai waktu pelaksanaan haji tersebut, dalam salah satu rubrik “tanya-jawab” yang secara khusus membahas gagasan dimaksud, MD pada akhir pembahasannya mengaitkan pemikiran Masdar

---

<sup>21</sup> Lihat “Mahasiswa IAIN Jakarta Agar Bertaubat,” *Media Dakwah*, no. 336 (Juni 2002), 10; “Menengok Kembali “Harunisme”: IAIN Dibuat *Nyeleneh* dari Sini?,” *Media Dakwah*, no. 340 (Oktober 2002), 33; “Ibadah Haji Model Orang Islam Liberal,” *Media Dakwah*, no. 331 (Januari 2002), 40.

<sup>22</sup> “Elit Rusak, Bangsa Hancur,” *Media Dakwah*, no. 335 (Mei 2002), 39.

<sup>23</sup> Argumentasi Masdar F. Mas'udi adalah bahwa ayat al-Qur'an yang menjelaskan soal haji menegaskan “*al-hajju asyhurun ma'lumat*,” yang berarti haji itu dalam beberapa bulan tertentu. Ayat ini, menurut Masdar, mengindikasikan bahwa haji tidak hanya di bulan Dzuhijjah semata, tetapi merentang dari Syawal hingga Dzuhijjah. Adapun Hadits yang menjelaskan “*al-hajju 'arafah*,” yang bisa dimaknai bahwa haji hanya di bulan Dzuhijjah dengan indikasi wuquf di Arafah, dipahami Masdar sebagai tidak bisa mengorbankan ayat di atas. Lihat kutipan pemikiran Masdar ini di: “Ibadah Haji Model Orang Islam Liberal,” 40; “Bahaya Islam Liberal (3),” 35. Dalam wawancaranya dengan JIL, sementara itu, Masdar menegaskan bahwa waktu pelaksanaan haji selama beberapa bulan tertentu yang diindikasikan oleh ayat di atas adalah tiga bulan, yakni Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah, seperti dijelaskan beberapa kitab tafsir. Hanya saja, ayat al-Qur'an di atas banyak dikalahkan pemaknaannya dengan merujuk kepada praktik Rasulullah yang hanya sekali berhaji pada jam-jam dan waktu-waktu yang lebih spesifik, dan kemudian disimpulkan bahwa tidak ada keabsahan wukuf di luar tanggal 9-13 Zulhijjah dengan mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Lihat wawancara Masdar F Mas'udi dengan JIL: “Haji Jadi Prestise Adalah Ekses Keagamaan,” *Jawa Pos Online*, 26 Januari 2003: [http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail\\_c&id=21944](http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=21944) (Diakses 26 Januari 2003).

F. Mas'udi tersebut dengan identifikasi kesesatan JIL. Menurut MD, dalam beribadah, umat Islam cukup mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan satu-satunya panutan yang bisa diikuti, termasuk dalam hal waktu pelaksanaan haji yang ditentukan pada bulan Zulhijjah. Adapun apa yang digagas oleh Masdar tersebut tidak merupakan apa yang dipraktikkan oleh Nabi sehingga tidak perlu diikuti, dan bahkan dianggap MD berbahaya bagi Islam.<sup>24</sup> Seraya menunjuk kepada Hadits Nabi "*Khudzu 'anni manasikakum* (Ambillah dariku tata cara ibadah hajimu)", MD menegaskan bahwa pemikiran Masdar F. Mas'udi itu, meski terkesan logis, aneh karena ibadah haji itu sudah memiliki ketentuannya dari ayat al-Qur'an, Hadits dan praktik Nabi SAW.<sup>25</sup> Identifikasi kesesatan dan perusakan akidah dikenakan dalam hal ini karena pemikiran bahwa waktu pelaksanaan haji merentang dalam sejumlah bulan dinilai sebagai pemikiran yang tidak menjadi apa yang dipikirkan dan diyakini oleh kebanyakan masyarakat Muslim, termasuk bukan merupakan praktik Nabi, meskipun pemikiran itu dinilai logis. Atas dasar itu, orang yang membuat cara atau model baru dalam berhaji, yang sejatinya tidak dicontohkan oleh praktik Nabi, dinilai oleh MD sama dengan membuat syari'at baru, dan karena itu dianggap sesat serta tidak boleh diikuti.<sup>26</sup>

Contoh kasus lain yang dicap sesat dan merusak akidah Islam adalah pemikiran JIL mengenai pluralisme agama. Seperti diketahui, sesuai dengan kerangka wawasan dasar JIL tentang agama sebagai wilayah privat dan hak individual,<sup>27</sup> Ulil menegaskan bahwa semua agama sama, dan Islam bukan agama yang paling benar, sehingga tidak ada eksklusivisme agama.<sup>28</sup> Gagasan tentang kesatuan semua agama tersebut didasarkan oleh Ulil pada pemahamannya terhadap doktrin penting yang sangat ditekankan dalam akidah Islam, yakni kesadaran terhadap kontinuitas dalam dua hal: kontinuitas wahyu dan kontinuitas kenabian. Sebagai salah satu agama samawi (*Abrahamic religions*), Islam, menurut Ulil, sadar atas prinsip kontinuitas tersebut sehingga kehadirannya tidak pernah

---

<sup>24</sup> "Ibadah Haji Model Orang Islam Liberal," *Media Dakwah* no. 331 (Januari 2002), 40.

<sup>25</sup> "Bahaya Islam Liberal (3)," *Media Dakwah* no. 333 (Maret 2002), 35.

<sup>26</sup> "Ibadah Haji Model Orang Islam Liberal," *Media Dakwah* no. 331 (Januari 2002), 40.

<sup>27</sup> "Tentang Jaringan Islam Liberal."

<sup>28</sup> Penegasan Ulil ini dikutip oleh *Gatra* dalam salah satu laporan utamanya. Lihat "Tafsir Agama Pemicu Fatwa," *Gatra*, no. 05/Tahun IX (21 Desember 2002), 29.

mengklaim membawa sesuatu yang baru, kecuali menegaskan kembali dan menyempurnakan apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya.<sup>29</sup> Dus, atas prinsip ini, kesatuan agama tampak dipandang oleh Ulil sebagai sebuah realitas keagamaan yang juga disemangati oleh Islam.

Pemikiran pluralisme agama JIL, seperti dipresentasikan oleh Ulil di atas, secara substansial dianggap oleh MD telah keluar dari dan bertentangan dengan keyakinan Islam itu sendiri. Hal ini karena Islam diyakini oleh MD sudah jelas membedakan dirinya dari selainnya sesuai dengan syari'at Islam yang berupa *nash qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah,<sup>30</sup> dan oleh karena itu pluralisme agama yang menyamakan semua agama itu dianggap oleh MD sama dengan mengingkari *nash* al-Qur'an dan Sunnah tersebut.<sup>31</sup> Lebih lanjut, MD dalam salah satu laporan utamanya, dengan mengutip pernyataan kontributor aktifnya, Hartono Ahmad Jaiz, menyebut pemikiran pluralisme agama JIL seperti dimaksud sebagai paham yang jelas-jelas sesat karena menyamakan agama nonIslam, yang disebut oleh yang bersangkutan sebagai agama syetan, dengan agama Islam sebagai agama Allah.<sup>32</sup> Paham JIL seperti tadi dianggap oleh MD sebagai paham yang ingin mengacaukan dan melemahkan akidah dan syari'at Islam,<sup>33</sup> dan para aktivis JIL yang memberlakukan paham ini dihukumi sebagai murtad.<sup>34</sup>

Bila dilakukan perbandingan argumentasi pencitraan aliran sesat dan agen perusak akidah Islam terhadap kelompok pemikir pembaru Islam sebelumnya dan JIL, tampak bahwa MD menyebut secara berbeda penyebaran kesesatan dan perusakan akidah Islam itu. Bila para pemikir pembaru terdahulu dinilai oleh MD menyebarkan kesesatan dan perusakan akidah Islam dengan model pengemasan ilmiah yang seolah-olah memiliki tingkat kesahihan argumentasi yang kuat, JIL tidak disebut oleh MD melakukan pengemasan serupa (Armando, 1993). Pada tahap ini, dengan demikian, penyebutan MD sebagai penyebar kesesatan dan perusak

---

<sup>29</sup> Ulil Abshar Abdalla, "Kenabian Universal dan Kerentanan Bersama," *Gatra*, no. 9, tahun IX (18 Januari 2003), 18.

<sup>30</sup> "Bahaya Islam Liberal (3)," 34-38; Akaha, "JIL, Potensi No! Ancaman Yes!," 28.

<sup>31</sup> "Menyamakan Semua Agama, Murtad," *Media Dakwah*, no. 342 (Desember 2002), 40.

<sup>32</sup> "Islam Liberal Menolak Dialog Terbuka," *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002), 56.

<sup>33</sup> "Islam Liberal Menolak Dialog Terbuka," *Media Dakwah* no. 333 (Maret 2002), 56.

<sup>34</sup> "Menyamakan Semua Agama," *Media Dakwah* no. 342 (Desember 2002), 40.

akidah Islam terhadap JIL tampak dilakukan dengan gradasi pencitraan negatif yang lebih melemah dibanding terhadap para pemikir pembaru Islam terdahulu.

Sementara itu, MD juga mencitrakan JIL sebagai penyebar fitnah dan kepanjangan tangan Orientalis dan sekularis Barat. Pencitraan ini terutama terkait dengan dua kasus utama JIL: *pertama*, penolakannya terhadap gagasan formalisasi syari'at Islam, dan *kedua*, idealisasinya terhadap gagasan separasi agama dari politik atau negara. Dalam kaitannya dengan kasus penolakan terhadap gagasan formalisasi syari'at Islam, seperti diketahui, Ulil, misalnya, menganggap penerapan syari'at Islam pada level negara akan mempersempit cara pandang Islam sehingga gerak Islam menjadi terjebak pada urusan-urusan seperti pengenalan jilbab, larangan minuman keras, dan larangan perzinahan,<sup>35</sup> sedangkan Muslim Abdurrahman, kontributor JIL, menegaskan bahwa diterapkannya syari'at Islam di Indonesia akan menimbulkan dampak yang tidak positif terhadap sejumlah kelompok, mula-mula kaum perempuan karena banyaknya regulasi Islam yang membatasi geraknya, dan kemudian diikuti oleh kelompok minoritas nonmuslim karena akan menjadi warga negara kelas dua dan orang-orang miskin karena kejelasan bukti pelanggaran syari'ah yang mereka lakukan dibanding tindakan korupsi orang kaya atau pejabat.<sup>36</sup> Adapun menurut Masdar F. Mas'udi, formalisasi syari'at Islam di tingkat negara akan menyebabkan terjadinya bahaya hipokrisi di kalangan masyarakat Muslim, karena ketaatan beragama mereka akan bergantung dan bergerak di bawah campur tangan dan paksaan negara.<sup>37</sup>

Pemikiran JIL yang tidak menghendaki syari'at Islam diterapkan di tingkat negara di atas ditolak oleh MD, baik dengan argumentasi perspektif sejarah

---

<sup>35</sup> "Tafsir Agama Pemicu Fatwa," Gatra no. 05/Tahun IX (Desember 2002), 29.

<sup>36</sup> Lihat wawancara Muslim Abdurrahman dengan JIL: "Korban Pertama dari Penerapan Syariat adalah Perempuan," *Jaringan Islam Liberal Online*, 16 September 2001: <http://www.islamlib.com/WAWANCARA/muslim.html> (Diakses 16 Januari 2003). Tulisan hasil wawancara ini diterbitkan ulang menjadi bagian dari buku JIL. Lihat Muslim Abdurrahman, "Korban Pertama Penerapan Syariat adalah Perempuan," dalam Luthfi Assyauckanie (ed.), *Wajah Islam Liberal*, 109-113.

<sup>37</sup> Lihat wawancara Masdar F. Mas'udi dengan JIL, "Dibutuhkan Islam sebagai Spirit," *Jaringan Islam Liberal Online*, 11 Agustus 2002: <http://www.islamlib.com/WAWANCARA/masdar%20spirit.html> (Diakses 16 Januari 2003); idem., "Keadilan Dulu, Baru Potong Tangan," *Jaringan Islam Liberal Online*, 22 Juli 2001: <http://www.islamlib.com/WAWANCARA/masdar.html> (Diakses 16 Januari 2003).

Indonesia maupun interpretasi teks ayat. Penolakan JIL beserta argumentasinya terhadap gagasan penerapan syari'at Islam di Indonesia dianggap oleh MD sebagai sikap atau respon pemikiran yang tidak fair karena telah menghakimi sesuatu yang belum ada dan terbukti di Indonesia.<sup>38</sup> Tudingan sebagai tidak fair ini keluar dari MD karena sejarah Indonesia modern sebagai sebuah negara bangsa belum pernah mengalami diterapkannya syari'at Islam yang dipeluk secara mayoritas oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, kekhawatiran-kekhawatiran yang dilontarkan JIL terhadap gagasan penerapan syari'at Islam di Indonesia dinilai oleh MD bahkan sebagai hal yang mengada-ada, sementara pandangan MD sendiri, berdasarkan ayat al-Qur'an 20:2,<sup>39</sup> menegaskan bahwa ketentuan Allah SWT diturunkan bukan untuk mencelakakan manusia, melainkan untuk kebaikan mereka.<sup>40</sup> Penegasan MD ini menunjukkan bahwa klaim-klaim kekhawatiran terhadap diterapkannya syari'at Islam sebagai merugikan dinilai oleh media tersebut mestinya tidak perlu keluar dari JIL jika kelompok Islam liberal tersebut mendasarkan diri pada penjelasan tekstual ayat, sebagaimana paling tidak yang dipahami oleh media tersebut dari teks ayat di atas, bahwa syari'at Islam itu sendiri diturunkan untuk kebaikan manusia.

Penolakan yang dilakukan oleh JIL dan para kontributornya terhadap penerapan syari'at Islam di atas mengantarkan MD sampai kepada suatu titik penilaian bahwa pemikiran JIL tersebut merupakan penyebaran tuduhan dan fitnah terhadap Islam. Pemikiran Masdar F. Mas'udi yang menolak penerapan syari'at Islam seperti di atas, sebagai misal, dinilai oleh MD sebagai bentuk penyebaran tuduhan dan fitnah dalam rangkaianannya yang panjang, tidak hanya terhadap Islam sebagai agama, tetapi juga pengalaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, para khalifah serta pemerintahan Islam kapan pun yang menerapkan syari'at Islam. Bahkan, Masdar F. Mas'udi, beserta para pemikir anti formalisasi syari'at Islam JIL lainnya, dianggap oleh MD lebih rela jika masyarakat berada dalam keadaan maksiyat, seperti melacur, daripada menerapkan aturan Allah lewat kekuasaan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> "Fenomena Menolak Syari'at," *Media Dakwah*, no. 335 (Mei 2002), 37.

<sup>39</sup> Ayat tersebut berbunyi: "*Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana li tasyqa* (Tidaklah Kami turunkan al-Qur'an kepadamu untuk mencelakan dirimu)." Lihat al-Qur'an 20:2.

<sup>40</sup> "Kewajiban Menerapkan Syari'at Islam," *Media Dakwah* no. 336 (Juni 2002), 40.

<sup>41</sup> "Fenomena Menolak Syari'at," *Media Dakwah* no. 335 (Mei 2002), 34.

Ide penolakan terhadap formalisasi syariat Islam di atas, sementara itu, disertai oleh JIL dengan ide sekularisasi atau separasi Islam dari negara. Gagasan sekularisasi ini menjadi kasus kedua dari pemikiran JIL yang disebut oleh MD sebagai penyebar fitnah dan kepanjangan tangan dari para Orientalis dan sekularis Barat. Gagasan pemisahan Islam dan negara ini disampaikan salah satunya oleh Ulil dengan argumentasinya bahwa pengandaian terhadap pemisahan antara Islam sebagai wilayah privat dan negara sebagai wilayah publik harus dilakukan untuk menghindari timbulnya kekacauan akibat campur aduknya antara keduanya, meski diakui juga oleh Ulil bahwa antara yang privat dan yang publik memang terkadang jumbuh dan tidak terpisah secara tegas. Keharusan pemisahan itu diibaratkan oleh Ulil dengan uang pribadi dan uang kantor yang tidak bisa dicampur ke dalam satu catatan pembukuan rekening.<sup>42</sup> Selain itu, negara sekular dianggap Ulil lebih unggul karena dinilai bisa mewadahi segala apa yang disebutnya dengan "energi kesalehan" dan "energi kemaksiyatan" secara bersamaan.<sup>43</sup> Kemampuan negara sekuler seperti ini, dalam pandangan Ulil, menjadi poin lebih yang tidak dimiliki oleh idealisasi negara Islam.

Terhadap pemikiran negara sekular JIL, seperti yang dikemukakan oleh Ulil tersebut, MD menolaknya dengan menegaskan keberlawanan gagasan tersebut dengan prinsip Islam. Selain menganggap JIL tidak menghendaki diterapkannya syariat Islam dalam pemerintahan akibat usaha pemisahan agama dari politik dan negara,<sup>44</sup> MD juga mengibaratkan substansi gagasan Ulil dan atau JIL tersebut dengan preferensi Islam liberal terhadap figur orang yang saleh tapi fasiq daripada saleh dan jujur. Untuk itu, dalam pandangan MD, pemikiran Ulil dan atau JIL ini melanggar salah satu prinsip Islam—*amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*, dengan cara melegalkan keburukan sederajat dengan kebajikan.<sup>45</sup> Sesuai dengan puritanisme dan atau konservatisme yang menjadi karakter pemikirannya, MD sudah

---

<sup>42</sup> Lihat kutipan ini di: "Penayangan Maya Islam Liberal." *Majalah Pantau Online* Tahun II Nomor 21 Januari 2002

<sup>43</sup> "Islam Liberal Versus Islam Literal," *Tempo*, No. 38/XXX (19 - 25 November 2001), 96. Laporan *Tempo* ini kemudian diarsip oleh JIL ke dalam situsnya. Lihat *Jaringan Islam liberal Online*: <http://www.islamlib.com/BERITA/tempo.html> (Diakses 17 Desember 2002).

<sup>44</sup> Lihat "Mahasiswa IAIN Jakarta Agar Bertaubat," 10; "Jaringan Islam Liberal di Indonesia," *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002), 54.

<sup>45</sup> "Landasan Keropos Islam Liberal," *Media Dakwah* no. 331 (Januari 2002), 20.

barang tentu menolak pemikiran yang dianggap longgar terhadap penegasan antara wilayah kebaikan dan keburukan. Apalagi, tugas utama pemimpin, menurut MD, adalah melindungi keutuhan agama dan memberantas kesesatan.<sup>46</sup>

Seraya menolak secara tegas, MD mengaitkan gagasan JIL mengenai separasi agama dari negara (isu negara sekuler) di atas dengan pemikiran serupa yang sebelumnya digagas oleh para Orientalis. Pemikiran sekular model JIL seperti tersebut dianggap oleh MD pada dasarnya tidak jauh berbeda dari apa yang dikerjakan oleh para Orientalis, seperti Snouck Hurgronje, Ter Haar, dan van Voolen. Snouck Hurgronje yang dengan Teori Resptie-nya menganggap hukum Islam baru bisa berlaku bila telah diakui masyarakat sebagai hukum adat, sebagai misal, dinilai oleh MD, meminjam istilah Hazairin – dosen Universitas Indonesia, sebagai “teori iblis”.<sup>47</sup> Pendek kata, anggapan kedekatan JIL dengan pemikiran para Orientalis ini, menurut MD, tampak dari bukti bahwa dalam kaitannya dengan ide penerapan syari’at Islam, seperti yang didiskusikan di atas, JIL sebagaimana para Orientalis berupaya mengganjal syari’at Islam dengan menempatkannya di bawah ketentuan hukum adat.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, penolakan JIL terhadap penerapan syari’at Islam dengan tetap mengidealisasikan paham separasi agama dari politik dan negara di atas dianggap oleh MD sebagai bagian atau kepanjangan tangan dari agenda politik Barat. Bahkan dalam sebuah laporan utamanya, Barat yang dimaksudkan oleh MD di sini lebih diperjelas lagi dengan Amerika Serikat, seperti tampak pada kutipan berikut: “Beberapa wartawan Muslim menjelaskan bahwa Islam Liberal ini kaitannya erat dengan pemerintah Amerika.”<sup>49</sup> Selain itu, identifikasi JIL dengan agenda Barat tampak dari penegasan MD yang merujuk kepada pernyataan kontributor aktifnya, Adian Husaini, yang menegaskan bahwa pemikiran dan gerakan mereka yang menolak syari’at Islam dan menghendaki pemisahan agama dan negara ini merupakan kepanjangan dari kepentingan Barat.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> “Kewajiban Menerapkan Syari’at Islam,” *Media Dakwah* no. 336 (Juni 2002), 33.

<sup>47</sup> Lihat “Pengusung Adat dan Aliran Sesat: Musuh Utama Syari’at,” *Media Dakwah*, no. 338 (Agustus 2002), 33.

<sup>48</sup> “Pengusung Adat dan Aliran Sesat,” *Media Dakwah* no. 338 (Agustus 2002), 33.

<sup>49</sup> “Islam Liberal Menolak Dialog” *Media Dakwah* no. 335 (Mei 2002), 57.

<sup>50</sup> “Islam Liberal Menolak Dialog,” *Media Dakwah* no. 335 (Mei 2002), 57. 57.

Adapun argumentasi yang disampaikan oleh MD untuk menolak gagasan sekularisasi JIL tampak tidak mengalami perubahan yang signifikan dari argumentasi penolakannya terhadap gagasan serupa oleh para pemikir pembaru Islam terdahulu. Seperti tampak pada penelitian Ade Armando, MD menganggap kelompok pemikir pembaru Islam, seperti Cak Nur dan seterusnya, sebagai agen kepentingan ekonomi politik Barat, dengan argumentasi utama yang menyebut adanya keterkaitan gerakan pembaruan Islam dengan sebuah strategi global untuk meleburkan Indonesia ke dalam hegemoni kepentingan ekonomi politik Barat. Sebagaimana terhadap JIL seperti diuraikan di atas, MD, digambarkan oleh Ade Armando, menyebut gerakan pemikiran yang dilakukan oleh para pemikir pembaru Islam tersebut memiliki tugas utama untuk memperlemah kesadaran keberagamaan masyarakat Islam Indonesia dan meminggirkan posisi politik mereka. Gerakan pemikir pembaruan beserta tugas utamanya itu, dalam pandangan MD –seperti dijelaskan Ade Armando, dilakukan dengan mentransformasikan secara revolusioner tatanan keagamaan yang telah berakar di masyarakat ke dalam hubungannya dengan kepentingan Barat (Armando, 1993).

Untuk kepentingan strategi global di atas, Cak Nur sebagai salah satu pemikir pembaru Islam saat itu digambarkan oleh MD, seperti juga dikutip Ade Armando, “menginginkan agama sebatas kepasrahan belaka, tanpa syari’ah.” Oleh karena itu, seperti terhadap JIL –sebagaimana dijelaskan di atas, MD juga menyebut Cak Nur dan para pemikir pembaru Islam lainnya sebagai penghancur Islam dari dalam. Hal yang sama lainnya dari argumentasi MD adalah penyejajaran pemikiran JIL dan para pemikir pembaru Islam terdahulu dengan pemikiran para Orientalis. Sebagaimana JIL yang diidentikkan di antaranya dengan Snouck Hurgronje –seperti diterangkan di atas, Cak Nur dan para pemikir pembaru Islam terdahulu disejajarkan pula dengan Orientalis dimaksud (Armando, 1993).

Namun demikian, yang membedakan dari argumentasi pencitraan terhadap JIL dan para pemikir pembaru Islam terdahulu adalah soal penyejajaran pemikiran kedua kelompok tersebut dengan gerakan Zionisme internasional. Bila terhadap kelompok para pemikir pembaru Islam MD, seperti diteliti oleh Ade Armando, secara vulgar melakukan penyejajaran itu (Armando, 1993), terhadap JIL hal itu tidak



ditampakkan secara jelas oleh media tersebut. Perbedaan penampakan di sini bisa jadi karena momen munculnya JIL dan kelompok pemikir pembaru Islam sudah berbeda. Kondisi politik Islam di Indonesia masa JIL sudah tidak lagi terpinggirkan, sebagaimana masa para pemikir pembaru, sehingga penampakan penyejajaran tersebut tampak dianggap tidak banyak menemukan relevansinya jika dikenakan secara ekspresif pada JIL. Atas dasar pertimbangan ini, MD tampak menganggap tidak signifikan, sekaligus tidak perlu, penampakan penyejajaran JIL dengan gerakan Zionisme internasional dimaksud.

Terlepas dari berbagai pemikirannya yang menyembulkan perdebatan tajam, JIL pada tataran berikutnya dicitrakan oleh MD sebagai anti dialog. Bahkan, salah satu laporan utama MD tentang JIL diberi judul besar "Islam Liberal Menolak Dialog Terbuka".<sup>51</sup> Dalam laporan utama itu, MD menegaskan bahwa praktik JIL ternyata tidak sesuai dengan jargon yang selama ini didengungkan agar umat Islam bersikap terbuka dan mengedepankan proses dialog. Bukti yang disampaikan MD adalah ketidakhadiran pihak JIL pada kegiatan dialog terbuka di suatu tempat di Jakarta yang diadakan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), padahal undangan khusus untuk berdialog di forum tersebut sudah disampaikan kepada pihak JIL.<sup>52</sup> Ketidakhadiran JIL pada forum dialog tersebut disayangkan oleh pembaca MD bahwa hal itu tidak semestinya terjadi.<sup>53</sup> Meski JIL sendiri sudah mengirim surat kepada pihak penyelenggara dan menyatakan kesediannya jika dialog dilakukan secara tertutup,<sup>54</sup> ketidakhadirannya pada acara dialog terbuka tersebut tidak urung disimpulkan oleh MD bahwa JIL anti dialog.

Anggapan bahwa JIL selalu menghindar dari dialog dengan pihak lain tersebut selanjutnya mendorong MD untuk menyebut kelompok JIL sebagai pengecut. Sebutan pengecut ini diberikan oleh MD karena JIL dianggap hanya berani untuk melakukan diskusi dan dialog dengan orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama dengan agendanya serta dengan orang-orang yang landasan berpikirnya masih bisa dipengaruhi olehnya. JIL dianggap MD

<sup>51</sup> *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002), 55-7.

<sup>52</sup> "Islam Liberal Menolak Dialog," *Media Dakwah* no 333 (Maret 2002), 55.

<sup>53</sup> Lihat surat Herman Siregar, "Tanggapan terhadap JIL," *Media Dakwah*, no. 335 (Mei 2002), 3.

<sup>54</sup> "Islam Liberal Menolak Dialog," *Media Dakwah* no 333 (Maret 2002), 55.

selalu menghindar untuk melakukan dialog baik dengan orang-orang yang berlainan cara berpikir agamanya, seperti Hartono Ahmad Jaiz dan Adian Husaini, maupun di hadapan umum secara terbuka. Kesan selalu menghindar ini dilekatkan oleh MD karena JIL dianggap takut dan gentar untuk berhadapan dengan pihak-pihak yang berbeda pemikiran dengannya maupun dengan masyarakat umum tersebut (Akaha, 2002).

Ketidakbersediaan JIL untuk hadir pada dialog terbuka merupakan sebuah kekeliruan mendasar yang telah dilakukan kelompok Islam liberal tersebut, dan hal demikian inilah yang di antaranya ikut semakin mempertajam perseteruan dengan kelompok lainnya yang tidak sependapat secara fundamental. Padahal, produksi gagasan yang dilakukan JIL selama ini juga memanfaatkan ruang publik melalui jaringan medianya sehingga ide-idenya sudah menjadi konsumsi publik pula. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, sudah semestinya jika gagasan yang diproduksi lewat ruang publik itu juga harus siap didialogkan dalam ruang publik pula, bagaimanapun ruang publik itu, sebagai bagian dari uji publik.

Adapun argumentasi yang disampaikan MD untuk mencitrakan JIL sebagai anti dialog di atas tampak bersifat repetitif semata dari pencitraan yang sama yang dilakukan oleh media tersebut terhadap kelompok pemikir pembaru Islam. Kalau JIL dinilai anti dialog karena dianggap menghindari dialog terbuka, kelompok pemikir pembaru sebelumnya semisal Cak Nur –seperti dijelaskan Ade Armando– juga dinilai oleh MD dengan hal yang sama dan dengan argumentasi yang serupa. Argumentasi itu di antaranya adalah bahwa Cak Nur tidak pernah bersedia menanggapi permintaan dialog HM Rasjidi untuk mendiskusikan gagasan-gagasannya. Bahkan, selain digambarkan tidak memberi ruang dan kesempatan yang cukup kepada peserta diskusi di Paramadina yang dikelolanya untuk mendialogkan gagasan-gagasannya, Cak Nur juga dinilai oleh MD, seraya merujuk kepada pendapat Ridwan Saidi, sebagai menggeser substansi setiap pernyataan orang lain terhadap gagasan Cak Nur dan menggantinya menjadi persoalan personal orang dimaksud (Armando, 1993). Jadi, dari sisi model argumentasi yang diterapkan untuk pencitraan anti dialog di atas, repetisi adalah kata yang tepat

digunakan untuk menggambarkan pencitraan MD terhadap JIL dan kelompok pemikir pembaru Islam terdahulu.

### **Penutup**

Posisi JIL dan MD pada hakikatnya merupakan representasi atau bentuk miniatur dari gambar besar dua kecenderungan pola interpretasi pemikiran dan keberagamaan di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang sangat plural: liberalisme dan anti-liberalisme Islam. Pembahasan akhir ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa pola interpretasi pemikiran dan keberagamaan Muslim Indonesia hanya memiliki dua pola tersebut karena disadari bahwa pola keberagamaan Muslim di negara ini dalam kenyataannya memang sangat plural. JIL menggambarkan pola Islam Indonesia yang mencoba mempraktikkan pemikiran liberalisme untuk memaknai Islam di dalam konteks modernisasi kehidupan masyarakat Indonesia, sedangkan MD justru mengilustrasikan usaha yang melanjutkan pola pemikiran konservatisme atau anti-liberalisme Islam dalam kehidupan Muslim Indonesia dengan maksud agar pemikiran dan praktik Islam tidak mengalami pencemaran dari pemikiran atau ideologi lain, seperti sekularisme dan atau liberalisme yang di antaranya berkembang di Barat.

Perdebatan yang terjadi antara JIL dan MD seperti teruraikan di muka menunjukkan daya tarik tertentu sebagai indikasi dari adanya perseteruan dua kutub pemikiran Islam Indonesia yang memiliki perbedaan mendasar. Hanya saja, yang cukup disayangkan adalah perdebatan itu pada tingkatan tertentu tidak selalu berada pada tataran intelektual, akan tetapi tidak jarang menyeret salah satu pihak untuk keluar darinya dan menggantinya dengan perseteruan pada tataran kepentingan politik. Melihat secara dekat sejumlah respon MD terhadap JIL, tampak bahwa bergesernya perdebatan dari level intelektual ke level kepentingan politik seperti dimaksud cukup mengemuka. Akibatnya, stigmatisasi politis atau pengenaan cap negatif terhadap JIL kerap mewarnai berbagai laporan MD sehingga perdebatan cenderung kurang maksimal dan produktif secara substansial bagi dinamika pemikiran Islam Indonesia.

Kalau pada awal tahun 1993 Ade Armando menyebut adanya “propaganda anti-Nurcholish” oleh MD dalam laporan media tersebut sejak Desember 1992 dalam

mereaksi pemikiran pembaruan Islam Cak Nur, kini dengan berbagai pencitraan MD terhadap JIL seperti dijelaskan di muka, penegasan serupa bisa juga dikenakan, yakni adanya "propaganda anti-Islam liberal dan JIL" oleh MD. Sebagaimana terhadap Cak Nur dan para pemikir pembaru Islam lainnya yang kepada mereka ditanamkan kesan kebencian dan alasan atas kebencian itu, propaganda serupa tampak dilakukan oleh MD terhadap JIL dengan tidak terlepas dari pembangunan citra negatif terhadap kelompok Islam liberal tersebut dan sekaligus pengerangkaan bangunan citra itu dalam sebuah bingkai argumentasi tertentu yang menjadi justifikasinya (Armando, 1993).

Dari bingkai argumentasi yang mengiringi perseteruan JIL dan MD di atas, tampak bahwa perseteruan yang terjadi antara JIL dan MD dalam konteks pemikiran Islam Indonesia kontemporer tidak hanya sebatas pengulangan semata dari perseteruan serupa sebelumnya antara kelompok pemikir pembaru Islam dan MD. Perseteruan yang disebut pertama juga merupakan suatu pemajuan/peningkatan (*advancement*) dari perseteruan yang disebut terakhir. Munculnya proses *advancement* tersebut sangat mungkin terjadi akibat konteks sosial politik, dengan berbagai konsekuensinya, masa perseteruan JIL dan MD yang berbeda dengan atau berubah dari hal yang sama masa perseteruan pemikir pembaru Islam dan MD.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muslim. "Korban Pertama Penerapan Syariat adalah Perempuan," dalam Luthfi Assyaukanie (ed.), *Wajah Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), 109-113.
- Abshar-Abdalla, Uli. "Kenabian Universal dan Kerentanan Bersama," *Gatra*, no. 9, tahun IX (18 Januari 2003), 18.
- Akaha, Abduh Zulfidar. "JIL, Potensi No! Ancaman Yes! (Tanggapan atas Tulisan "JIL, Potensi atau Ancaman?")," *Media Dakwah*, no. 340 (Oktober 2002), 28-30.
- Armando, Ade. "Citra Kaum Pembaru Islam dalam Propaganda *Media Dakwah*," *Ulumul Qur'an*, no. 3, vol. IV (Tahun 1993), 66-76.
- Assyaukanie, Luthfi (ed.). *Wajah Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002).
- Federspiel, Howard M. "The Political and Social Language of Indonesian Muslims: The Case of *Al-Muslimun*," *Indonesia*, no. 38 (October 1984), 55-73.
- Gatra*. "Tafsir Agama Pemicu Fatwa," *Gatra*, no. 05/Tahun IX (21 Desember 2002), 28-9.
- Hefner, Robert W. "Print Islam: Mass Media and Ideological Rivalries among Indonesian Muslims," *Indonesia*, no. 64 (October 1997), 77-103.
- . *Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000).
- Isma'iel, Syamsul Bahri. "Islam Liberal: Menafsirkan Agama dengan Hermeneutika Barat," *Media Dakwah*, no. 334 (April 2002), 24-5.
- . "Statuta Hukum Nikah Lintas Agama: Belajar dari Kasus ke Kasus Serupa," *Media Dakwah*, no. 341 (Nopember 2002), 30-2.
- Jaringan Islam Liberal (JIL). "Tentang Jaringan Islam Liberal," *Jaringan Islam Liberal Online*: <http://www.islamlib.com/REDAKSI/tentang.html> (Diakses 21 Desember 2002).
- Liddle, William R. "Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia," in Mark R. Woodward (ed.), *Toward A New Paradigm: Recent Development in Indonesian Islamic Thought* (Tempe, Arizona: Arizona State University, 1996), 323-356.
- . "Skripturalisme Media Dakwah: Satu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru," *Ulumul Qur'an*, no. 3, vol. IV (Tahun 1993), 53-65.

*Majalah PANTAU*. "Penayangan Maya Islam Liberal," *Majalah PANTAU Online*, Tahun II Nomor 021 - Januari 2002: <http://www.pantau.or.id/txt/21/03.html> (Diakses 10 Desember 2002).

*Media Dakwah*. "Islam Liberal dan Misinya," *Media Dakwah*, no. 332 (Februari 2002), 14-5.

\_\_\_\_\_. "Menyamakan Semua Agama, Murtad," *Media Dakwah*, no. 342 (Desember 2002), 40.

\_\_\_\_\_. "Bahaya Islam Liberal (1)," *Media Dakwah*, no. 331 (Januari 2002), 33-8.

\_\_\_\_\_. "Bahaya Islam Liberal (3): (Lanjutan Edisi Februari 2002M)," *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002), 33-8.

\_\_\_\_\_. "Fenomena Menolak Syari'at," *Media Dakwah*, no. 335 (Mei 2002), 33-8.

\_\_\_\_\_. "Ibadah Haji Model Orang Islam Liberal," *Media Dakwah*, no. 331 (Januari 2002), 40.

\_\_\_\_\_. "Kewajiban Menerapkan Syari'at Islam, Membincang Kontroversi Islam Liberal," *Media Dakwah*, no. 336 (Juni 2002), 33-40.

\_\_\_\_\_. "Mahasiswa IAIN Jakarta Agar Bertaubat," *Media Dakwah*, no. 336 (Juni 2002), 10-11.

\_\_\_\_\_. "Menengok Kembali "Harunisme": IAIN Dibuat *Nyeleneh* dari Sini?," *Media Dakwah*, no. 340 (Oktober 2002), 33-8.

\_\_\_\_\_. "Musim Memilih Sekolah untuk Anak," *Media Dakwah*, no. 337 (Juli 2002), 15-6.

\_\_\_\_\_. "Elit Rusak, Bangsa Hancur," *Media Dakwah*, no. 335 (Mei 2002), 39.

\_\_\_\_\_. "Fenomena Menolak Syari'at," *Media Dakwah*, no. 335 (Mei 2002), 33-8.

\_\_\_\_\_. "Islam Liberal Menolak Dialog Terbuka," *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002), 55-7.

\_\_\_\_\_. "Jaringan Islam Liberal di Indonesia," *Media Dakwah*, no. 333 (Maret 2002), 53-5.

\_\_\_\_\_. "Landasan Keropos Islam Liberal Membahayakan," *Media Dakwah*, no. 332 (Februari 2002), 17-20.

\_\_\_\_\_. "Pengusung Adat dan Aliran Sesat: Musuh Utama Syari'at," *Media Dakwah*, no. 338 (Agustus 2002), 33-8.

\_\_\_\_\_. "Ucapan-Ucapan Destruktif Para Tokoh Liberal dan Pendukungnya," *Media Dakwah*, no. 332 (Februari 2002), 15-6.

\_\_\_\_\_. "Tokoh JIL Disuruh Tobat," *Media Dakwah*, no. 342 (Desember 2002), 7.

- \_\_\_\_\_. "Ibadah Haji Model Orang Islam Liberal," *Media Dakwah*, no. 331 (Januari 2002), 40.
- Rucita, Ceceng. "JIL dan Logika Iblis," *Media Dakwah*, no. 336 (Juni 2002), 16-8.
- Sahal, Ahmad. "Umar bin Khattab dan Islam Liberal," *Tempo*, no. 5/XXXI (7 April 2002), 49.
- Siregar, Herman. "Tanggapan terhadap JIL," *Media Dakwah*, no. 335 (Mei 2002), 2-3.
- Tempo*. "Islam Liberal Versus Islam Literal," *Tempo*, No. 38/XXX (19 - 25 November 2001), 96.
- Wawancara Masdar F. Mas'udi dengan JIL. "Dibutuhkan Islam sebagai Spirit," *Jaringan Islam Liberal Online*, 11 Agustus 2002: <http://www.islamlib.com/WAWANCARA/masdar%20spirit.html> (Diakses 16 Januari 2003).
- \_\_\_\_\_. "Haji Jadi Prestise Adalah Ekses Keagamaan," *Jawa Pos Online*, 26 Januari 2003: [http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail\\_c&id=21944](http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=21944) (Diakses 26 Januari 2003).
- \_\_\_\_\_. "Keadilan Dulu, Baru Potong Tangan," *Jaringan Islam Liberal Online*, 22 Juli 2001: <http://www.islamlib.com/WAWANCARA/masdar.html> (Diakses 16 Januari 2003).
- Wawancara Muslim Abdurrahman dengan JIL: "Korban Pertama dari Penerapan Syariat adalah Perempuan," *Jaringan Islam Liberal Online*, 16 September 2001: <http://www.islamlib.com/WAWANCARA/muslim.html> (Diakses 16 Januari 2003).
- Zada, Khamami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002).